

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

a. Tantangan

Tantangan yang ada adalah rendahnya sumber daya manusia petugas kearsipan dalam pengelolaan kearsipan dan masih kurangnya anggaran dalam penyediaan sarana kearsipan dan kurang representatifnya ruangan arsip dikarenakan belum adanya depo arsip.

Selanjutnya tantangan dalam bidang pelayanan yaitu kurangnya petugas pelayanan perpustakaan dan kurangnya pustakawan, serta petugas dalam pengolahan perpustakaan serta belum adanya gedung adanya gedung kantor yang sekaligus bisa dijadikan sebagai tempat layanan perpustakaan. Tantangan berikutnya adalah kurangnya fasilitas dan prasarana pada perpustakaan di desa/kelurahan, PD, sekolah seperti belum sepenuhnya maksimal gedung, rak buku, meja dan kursi baca, kurangnya petugas pengelola perpustakaan yang memahami tentang pengelolaan perpustakaan.

Dalam pengembangan perpustakaan dan arsip daerah dihadapkan dengan beberapa tantangan antara lain:

- Memberikan pengertian kepada masyarakat akan peran dan fungsi perpustakaan dan arsip sebagai sarana informasi;
- Membuat regulasi untuk menguatkan fungsi dari perpustakaan dan kearsipan;
- Mengembangkan perpustakaan yang ada di desa-desa, kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Memfasilitasi wilayah-wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum memiliki layanan perpustakaan;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk pengembangan perpustakaan dan kearsipan.

b. Peluang

Dalam pelaksanaan misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peluang yang dapat dimanfaatkan adalah:

- Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dan pelestarian perpustakaan dan arsip;
- Dukungan regulasi yang telah menetapkan perpustakaan dan kearsipan sebagai urusan wajib pemerintah daerah serta peraturan yang terkait perpustakaan dan kearsipan yang telah secara spesifik menetapkan tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan daerah;

- Masih terdapat wilayah-wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membutuhkan layanan perpustakaan;
- Masih terdapat arsip-arsip yang belum dikuasai dan tertata, baik secara manual maupun elektronik;
- Keberadaan dan perkembangan perpustakaan PD, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah;
- Rendahnya kualitas hidup masyarakat;
- Rendahnya daya beli masyarakat terhadap buku;
- Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- Adanya kesempatan pustakawan dan arsiparis untuk bermitra kerja dengan jabatan fungsional lainnya;
- Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik sangat diperlukan transparansi dan akuntabilitas kinerja dari aparatur pemerintah yang ditandai dengan ketersediaan arsip yang autentik dan reliable;
- Semakin meningkatnya jasa kearsipan dalam usaha pembenahan dan penyimpanan arsip pada instansi pemerintah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang masih ada dalam pembangunan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah yang berkaitan dengan bidang aparatur. antara lain kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berlandaskan pada prinsip organisasi yang efisien dan rasional. sehingga struktur organisasi kurang proporsional. sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas. kompetensi dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja.

Demikian pula halnya terkait dengan pelayanan publik. khususnya yang bersentuhan dengan masyarakat. belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. hal ini dikarenakan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas yang diinginkan belum dapat diwujudkan. tetapi secara bertahap kekurangan-kekurangan yang ada akan terus dilakukan untuk mencapai penyempurnaan-penyempurnaan. sehingga pada kesempatan mendatang harapan tersebut dapat diwujudkan pada waktunya.

Kondisi sebagaimana disebutkan diatas sangat berkaitan erat dengan isu-isu strategis yang merupakan permasalahan inti yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki implikasi jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis terkait dengan tugas pokok fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

- a. Belum tersedianya gedung, sarana dan prasarana perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Belum tersedianya gedung depo penyimpanan arsip statis dan arsip vital;
- c. Kualitas SDM dan Pelayanan Kearsipan yang masih rendah;
- d. Penyelenggaraan kearsipan yang masih belum standarisasi;
- e. Kompetensi Pengelola Perpustakaan yang masih terbatas;
- f. Masih kurangnya bahan pustaka;
- g. Ketersediaan layanan Perpustakaan yang berbasis teknologi dan komunikasi belum memadai;
- h. Masih rendahnya sarana dan prasarana;
- i. Masih rendahnya kesadaran tentang arsip Vital ;
- j. Masih rendahnya kesadaran tentang arsip asset
- k. Masih rendahnya kesadaran tentang arsip terjaga ;

- i. Masih rendahnya penataan arsip yang sesuai dengan standar kearsipan ;
 m. Masih rendahnya pengetahuan SDM tentang pengelolaan arsip dinamis di 7 (tujuh) Kab/Kota
 Prov. Kep. Babel ;

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih rendahnya sarana dan prasarana	Belum ada gedung yang memadai	1) Kurangnya dana 2) Belum ada Lahan untuk pembangunan gedung
2	Masih rendahnya penataan arsip yang sesuai dengan standar kearsipan	1) Tidak ada penerimaan SDM 2) Penempatan SDM tidak sesuai dengan pendidikan	1) Kurangnya jumlah SDM 2) Kurangnya Kompetensi SDM
3	Masih rendahnya kesadaran masyarakat pentingnya pelestarian arsip	1) Masih banyak lembaga kearsipan yang belum mengelola arsip dengan baik	1) Kurangnya pembinaan dan pengawasan kearsipan
4	Kurangnya minat baca masyarakat	1) Kurangnya Koleksi bahan pustaka 2) Kurangnya kualitas layanan	1) Belum ada gedung perpustakaan yang memadai 2) Kurangnya dana 3) Kurangnya kualitas SDM Perpustakaan

3.2. **Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misinya.

Adapun visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 adalah **"Babel Sejahtera. Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"**. Dalam upaya mencapai visi tersebut ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal
4. Meningkatkan pelayanan dan kualitas kesehatan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Dari 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada misi yang ke 3 (Tiga) yaitu Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal dan misi yang ke 5 (Lima) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan meningkatkan derajat kualitas layanan publik. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi modern, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat desa dan kota dalam bidang perpustakaan, arsip dan sosial lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan, sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan kemajuan zaman.

Sesuai dengan misi tersebut maka Renstra Tahun 2017-2022 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih berupa kepercayaan publik atau masyarakat akan pentingnya peranan dan fungsi perpustakaan dan kearsipan didalam penyelenggaraan pemerintah daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

3.3. Telaahan Renstra K/L

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga merupakan bagian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Oleh sebab itu

Penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain berpedoman dan mengacu kepada RPJMD, Visi dan Misi Kepala Daerah dan juga menyelaraskan dengan kebijakan yang disusun oleh Instans Pembina Pusat yaitu Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI, sehingga dalam Renstra ini ada keselarasan dan sinergi antara Program pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten dan Kota.

I. Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Keputusan Kepala Perpustakaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Visi dan Misi Perpustakaan Nasional RI Tahun 2015 – 2019.

1) Visi :

Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan.

2) Misi :

"Terwujudnya layanan prima, terwujudnya perpustakaan sebagai pelestari khazanah budaya bangsa, terwujudnya perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan".

3) Program dan Kegiatan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

A. Program Pengembangan Perpustakaan , dilakukan melalui kegiatan

sebagai berikut :

1. Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional
2. Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional
3. Preservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno
4. Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
5. Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
6. Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan
7. Pengembangan Perpustakaan
8. Pengembangan Pustakawan
9. Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi

**B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Perpustakaan Nasional**

dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Operasional
Perkantoran Perpustakaan Nasional.
2. Perencanaan, Hukum dan Humas Perpustakaan Nasional.
3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Perpustakaan
Nasional.

**C. Program dan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Perpustakaan Nasional**

dilakukan dengan kegiatan Penyediaan /Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perpusnas

4) Kerangka Regulasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Agar Tugas, fungsi, dan kewenangan Perpustakaan Nasional RI dapat berjalan dengan baik dalam melaksanakan program dan kegiatan, diperlukan dukungan regulasi yang memadai. Kerangka regulasi yang akan disusun pada tahun 2015-2019 antara lain adalah Peraturan Kepala sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu tentang 1) Standar tenaga Perpustakaan dan 2) Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan serta peraturan kepala tentang :

- 1) Pembudayaan Gemar Membaca 2) Grand Desain Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional dan 3) Pembangunan Perpustakaan Model sebagaimana tercantum dalam tabel lampiran 3.

5) Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan Pembangunan di bidang Perpustakaan memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat sebagai mana di amanatkan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Prioritas Perpustakaan penguatan kelembagaan tahun 2015-2019 antara lain melalui :

1. Penguatan Kapasitas kelembagaan perpustakaan.
2. Pembentukan Dewan Perpustakaan.
3. Pembinaan Organisasi profesi pustakawan.
4. Penguatan lembaga akreditasi Perpustakaan dan sertifikasi pustakawan.

5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama pusat, daerah, masyarakat, satuan pendidikan dan pihak swasta dalam pembangunan perpustakaan.

II. Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia

(Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019).

1) Visi dan Misi Arsip Nasional RI Tahun 2015 – 2019

Visi :

"Arsip sebagai Pilar *Good Governance* dan integrasi memori kolektif bangsa".

2) Misi :

1. Mewujudkan Arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan obyek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintah melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat ;
2. Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi *electronic record system*;
3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis , sistem restorasi modern , digitalisasi dan sistem jaringan informasi ;
4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem jaringan aplikasi kearsipan
5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai Alat Kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan.
6. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di Pusat dan Daerah terutama Organisasi Kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dan ICA dan Sarbica.

3) Program dan Kegiatan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2016 - 2021

No	Program Lintas/ Program/Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung Jawab/Pelaksana an
				Penanggung Jawab / Pelaksanaan					
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pembinaan Kearsipan Daerah I	Meningkatkan efektifitas penyelenggara an system kearsipan di lembaga kearsipan daerah Provinsi dan Kota	Jumlah Pemerintah Prov/Kab/Kot a yang Mendapatkan Kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan Peraturan Perundangan	3 Prov/Kab/Kot a	2 Prov	2 Prov	2 Prov	1 Prov	ANRI

2	Pembinaan Kearsipan Daerah II (Unit Baru)	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga kearsipan daerah Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Pemerintah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan kemampuan teknis pengelolaan arsip aset sesuai dengan peraturan perundangannya	4 Prov	2 Prov	2 Prov	2 Prov	1 Prov	AN RI
3	Pembinaan Kearsipan Pusat	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan system kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintahan pusat	Jumlah Instansi Pusat yang sudah Menerangkan SIKD-TIK	11 Instansi	25 Instansi	35 Instansi	45 Instansi	55 Instansi	AN RI
4	Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Pengelolaan Sistem dan jaringan informasi Kearsipan	35 Simpul	40 Simpul	45 Simpul	60 Simpul	75 Simpul	AN RI

		nasional) (diusulkan)							
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Mempertimbangkan hal tersebut maka Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun kurun waktu 2017–2022 diarahkan ke dalam kegiatan-kegiatan layanan informasi perpustakaan dan arsip, pelestarian bahan pustaka dan arsip sebagai bahan budaya bangsa serta pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan arsip PD, desa/kelurahan dan sekolah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104°50' sampai 109°30' bujur timur dan 0°50' sampai 4°10' lintang selatan dengan luas wilayah 81.725.14 KM² yang terdiri dari luas daratan ± 16.424.14 KM² dan luas lautan ± 65.301 KM². Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata. Dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi 1 kota dan 6 kabupaten dengan jumlah kecamatan adalah sebanyak 47 kecamatan, jumlah kelurahan adalah sebanyak 78 kelurahan dan jumlah desa sebanyak 309 desa.

Jumlah sekolah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 1.406 sekolah dengan rincian 75% berstatus negeri dan 25% berstatus sekolah swasta. Sedangkan jumlah siswa yang terdata berjumlah 261.934 siswa dengan persentase 84% di negeri dan 16% di sekolah swasta. Sekolah Dasar yang ada sebanyak 784 sekolah.

Sekolah-sekolah tersebut telah memiliki perpustakaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 10 yaitu Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing. Perpustakaan Umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang mana diberikan tugas melaksanakan pembinaan terhadap perpustakaan yang ada di desa/kelurahan, SD, SMP, SMA/SMK negeri/swasta yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pembinaan dan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan maupun perpustakaan sekolah dilakukan dengan menyasar ke desa/kelurahan dengan pola pembinaan pengolahan bahan pustaka, peningkatan sumber daya manusia melalui bimtek, peningkatan bantuan bahan pustaka, peningkatan sarana dan prasarana. Selain itu juga dilakukan perpustakaan keliling ke

desa/kelurahan maupun sekolah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 22 (5) dengan menggunakan 1 unit mobil Pelayanan Perpustakaan Keliling bantuan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2009.

Di bidang kearsipan juga melaksanakan pembinaan dan pendampingan ke PD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta lomba pengelolaan kearsipan di tingkat PD, desa/kelurahan, LKD kabupaten/kota. Selain itu untuk peningkatan sumber daya pengelola kearsipan juga dilakukan bimtek bagi pengelola arsip di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara struktural terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 2 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 8 (delapan) orang Kepala Seksi.

Dari perangkat struktural ini masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai dasar untuk melaksanakan program dan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat ditampilkan hal-hal yang paling strategis yang merupakan tugas yang utama dan harus dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

a. Pembinaan

- Melaksanakan pembinaan perpustakaan ke desa/kelurahan, sekolah dan perguruan tinggi serta pembinaan kearsipan ke PD se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Melaksanakan pembinaan di sekolah-sekolah dan desa/kelurahan tentang manfaat perpustakaan sebagai wadah penyediaan sarana buku untuk meningkatkan minat baca dan pembinaan tentang penyusunan dan pengelolaan bahan pustaka selain itu melakukan pembinaan tentang daftar inventaris arsip.
- Melaksanakan pembinaan tentang pendataan, pengelolaan dan pelaporan tentang perkembangan perpustakaan dan pembinaan tentang pemilahan, penyimpanan dan pemberkasan arsip.

b. Pelayanan

- Melaksanakan layanan perpustakaan dan informasi layanan kerjasama perpustakaan dan otomasi, layanan bibliografi, literatur serta pelaksanaan layanan dan publikasi arsip.

- Melaksanakan layanan kepada masyarakat terutama untuk menarik minat baca serta masyarakat sadar arsip melalui kerjasama antar instansi/lembaga terkait.
- Melaksanakan layanan prima melalui seleksi bahan pustaka baik terbitan daerah maupun umum termasuk pengadaan semua jenis bahan pustaka sesuai kebutuhan pemustaka serta melaksanakan layanan kearsipan melalui jasa teknis kearsipan seperti pembinaan, pengelolaan kearsipan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip.
- Melaksanakan layanan perpustakaan didukung dengan sistem komputerisasi dan internet atau jaringan informasi.

c. Pelestarian

- Melestarikan karya cetak terbitan serta melestarikan arsip baik dinamis dan statis.
- Melestarikan dan pemanfaatan terbitan daerah sebagai hasil budaya bangsa baik tertulis, tercetak dan pelestarian arsip melalui fumigasi dan pemilahan, penyiangan serta pemberkasan.
- Melestarikan bibliografi daerah, artikel/majalah, abstrak penelitian dan pelestarian arsip melalui restorasi dan konservasi arsip.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang baik (*good governance*), tentunya harus disikapi dengan berbagai faktor yang dapat mendukung terhadap penetapan kebijakan yang ada. mengingat untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan kesepahaman dan sinergitas dari berbagai elemen, yakni tidak saja dalam lingkungan internal akan tetapi eksternal juga turut berperan dalam membantu pencapaiannya. hal mana prosesnya merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. disamping adanya pengaruh globalisasi. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar bahkan merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk meresponnya dengan melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik demi terwujudnya *good governance*.

Upaya untuk mewujudkan *good governance* tersebut, diantaranya adalah dengan jalan reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Paradigma tersebut di atas berimplikasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sebagaimana mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang dijelaskan lebih lanjut bahwa Bidang Kearsipan merupakan satu rumpun urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas.

Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai bidang garapan yang sama, yakni sama-sama mengelola informasi dan memberikan layanan pada publik. Persamaan mendasar dari arsip dan bahan perpustakaan adalah bahwa keduanya membutuhkan pemeliharaan dan pelestarian. Media simpan bahan perpustakaan dan arsip dapat berupa media simpan konvensional (kertas), media simpan digital dan elektronik, serta media simpan khusus (*in special formats*). Perbedaanannya adalah bahwa Perpustakaan mengelola informasi dalam bingkai *information product*, yakni informasi yang sengaja diciptakan untuk didesiminasikan kepada publik adapun Kearsipan

mengelola informasi terutama *information by product*, yakni informasi yang lahir karena adanya kegiatan organisasi atau institusi.

Hal ini sejalan dengan tujuan perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyatakan bahwa "perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa" demikian pula sejalan dengan tujuan kearsipan yang diamanatkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menyatakan bahwa tujuan kearsipan adalah:

1. Untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional
2. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. Mendinamisasikan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
7. Menjamin keselamatan asset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa, dan
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituntut untuk melakukan upaya pengelolaan kearsipan secara baik dan benar berdasarkan kaidah kearsipan dengan efektif dan efisien. Serta melakukan upaya penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya.

Dalam mengaplikasikan strategi manajemen di sektor publik, hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal yang merupakan kegiatan yang sangat vital, bahkan dapat menentukan kelangsungan hidup suatu organisasi.

Lingkungan eksternal bagi kegiatan di sektor publik tidak jauh berbeda dengan lingkungan eksternal yang terjadi di sektor bisnis. yang membedakannya hanyalah bahwa di sektor bisnis yang berorientasi pada *profit/keuntungan* yang sebesar-besarnya sehingga perlu memperhatikan lingkungan eksternal untuk organisasi pesaingnya. sedangkan didalam sektor publik harus memperhatikan lingkungan eksternal dalam pengambilan keputusan. karena organisasi di sektor publik merupakan organisasi tanpa saingan dan pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat luas bukan pada organisasi pesaing. Jadi lingkungan eksternal bagi kegiatan di sektor publik adalah masyarakat luas dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya sehingga para pengambil keputusan dapat memberikan pelayanan/kepuasan bagi masyarakat luas dan memberikan hasil yang lebih baik.

Untuk menjaga agar organisasi tetap eksis. maka organisasi tersebut harus melakukan kegiatan "**Echological Niche.**" yaitu suatu kondisi dimana prinsip-prinsip manajemen dalam hal ini penyediaan **the six M** yaitu *man.machine.materials.money.markets* dan *method* sudah bekerja secara harmonis artinya *echological niche* akan terjadi. andaikata lingkungan beranggapan bahwa sistem-sistem tersebut bekerja dengan baik/mapan yang didukung oleh lingkungan yang berkepentingan atau lingkungan yang sangat berkepentingan terhadap eksistensi sistem.

Dampak yang ditimbulkan apabila organisasi publik tidak memperhatikan *echological niche* adalah terjadinya ketimpangan atau ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip manajemen. karena tidak saling mendukung yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dan sasaran organisasi malah tidak menutup kemungkinan akan menghancurkan atau mematikan organisasi tersebut.

Analisis yang digunakan dalam manajemen stratejik adalah (*Strengths. Weaknesses. Opportunities. Threats*) yang dikenal dengan sebutan **SWOTAnalysis** atau analisis mengenai faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. yang digunakan sebagai instrumen untuk mengantisipasi perubahan lingkungan sekaligus sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah melalui pengambilan keputusan.

Selanjutnya analisis SWOT atau analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- 2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 3) Dukungan regulasi yang telah menetapkan kearsipan dan perpustakaan sebagai urusan wajib pemerintah daerah serta peraturan yang terkait kearsipan dan perpustakaan yang telah secara spesifik menetapkan tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan bidang kearsipan dan perpustakaan di daerah.

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Masih kurangnya fungsional arsip dan pustakawan.
- 2) Masih perlunya peningkatan kemampuan SDM yang mengelola arsip dan perpustakaan dalam mengembangkan kearsipan dan perpustakaan.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kearsipan dan perpustakaan kepada masyarakat
- 4) Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap kearsipan dan perpustakaan.

2. Lingkungan eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1. Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dan pelestarian arsip dan perpustakaan;
2. Masih terdapat wilayah-wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membutuhkan layanan perpustakaan;
3. Masih terdapat arsip-arsip yang belum dikuasai dan tertata, baik secara manual maupun elektronik.

b. Ancaman (Threat)

- 1) Berkurangnya minat berkunjung karena keterbatasan ragam bacaan dan keterbatasan;
- 2) Minimnya kerja sama dengan institusi atau lembaga lainnya dalam rangka mengembangkan dan memperluas jaringan pelayanan kearsipan dan perpustakaan;
- 3) Perkembangan teknologi akan mengurangi peran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika tidak segera menyesuaikan diri.

Dari pemaparan SWOT Analysis di atas, maka dapat ditentukan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran dari Misi organisasi serta Strategi, yang meliputi program, dan kegiatan operasional dan Kebijakan, yang merupakan pedoman pelaksanaan bagi tindakan tertentu berdasarkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis (Renstra). Disinilah pentingnya penyusunan rencana strategis. Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan Strategi dan kebijakan.

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Meningkatn ya minat baca siswa		Presentase petumbuhan pengunjung perpustakaan sekolah		49	64	71	86	92
	Meningkatn ya kualitas pelayanan perpustaka an sekolah		Persentase Perpustakaan sekolah yang berprestasi (%)		4	4	4	4	4
	Meningkatn ya kualitas pelayanan kearsipan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kearsipan		60	70	75	80	80
	Meningkatn ya Kualitas Pembinaan dan Pengawas an		Persentase kelembagaan kearsipan yang mengelola arsip sesuai standar (%)	15	42	45	50	60	70

	Kearsipan							
	Meningkatn ya tata kelola arsip daerah	Persentase pertumbuhan jumlah arsip yang terkelola	14	20	25	30	40	50
Meningkatn ya kualitas pelayanan perpustaka an		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan		78,69	78,80		79,58	80
	Meningkatn ya kualitas layanan perpustaka an	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan provinsi	76,69	78,69	78,80	79	79,58	88
	Meningkatn ya minat baca masyarakat	Persentase pertumbuhan minat baca masyarakat	0	0	65	78	81	85

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi (Meneg PAN:2008). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan lima tahun ke depan meliputi:

- a. Meningkatnya minat baca siswa
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan

4.1.2. Sasaran

Setelah ditetapkan tujuan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya ditentukan sasaran.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan (Meneg PAN:2008).

Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari dua pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulan, paling lama satu tahun. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan sekolah
- b. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
- c. Meningkatnya tata kelola arsip daerah
- d. Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan
- e. Meningkatnya minat baca masyarakat

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diperlukan strategi yang meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan sekolah
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perpustakaan sekolah Meningkatkan minat dan budaya masyarakat dengan layanan perpustakaan yang berbasis teknologi
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kearsipan.
- d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan daerah
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perpustakaan
- f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan provinsi

Strategi ini adalah sebagai pedoman kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

5.2. Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyediaan bahan pustaka pada perpustakaan sekolah
- b. Penyelenggaraan pembinaan kepada sumber daya manusia perpustakaan sekolah
- c. Penyelenggaraan bimbingan kepada sumber daya manusia kearsipan
- d. Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan daerah yang memenuhi standar
- e. Penyelenggaraan bimbingan kepada sumber daya manusia perpustakaan
- f. Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :Babel Sejahtera. Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi.			
MISI III : Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya minat baca siswa	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan sekolah	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan sekolah	Penyediaan bahan pustaka pada perpustakaan sekolah
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perpustakaan sekolah	Penyelenggaraan pembinaan kepada sumber daya manusia perpustakaan sekolah
MISI V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi			
Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kearsipan	Penyelenggaraan bimbingan kepada sumber daya manusia kearsipan
	Meningkatnya tata kelola arsip daerah	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan daerah	Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan daerah yang memenuhi standar
Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan provinsi	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perpustakaan	Penyelenggaraan bimbingan kepada sumber daya manusia perpustakaan
	Meningkatnya minat baca masyarakat	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan provinsi	Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan provinsi yang memenuhi standar

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Program dan kegiatan yang disusun terdiri dari:

I. Program Peningkatan Layanan Pemerintah

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
6. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

II. Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan

1. Kegiatan penyeiaan bahan pustaka
2. Kegiatan Penerbitan koleksi buku perpustakaan
3. Kegiatan penyusunan bibliografi induk daerah dan katalog induk daerah
4. Kegiatan pengumpulan koleksi hasil terbitan daerah
5. Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Bahan Pustaka
6. Kegiatan Sosialisasi peraturan-peraturan tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
7. Kegiatan pengembangan koleksi digital
8. Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca
9. Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling
10. Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca
11. Kegiatan Pengelolaan Layanan Website
12. Kegiatan Pameran buku
13. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
14. Kegiatan penyediaan buku bacaan pada perpustakaan sekolah

III. Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan

1. Kegiatan akreditasi perpustakaan sekolah
2. Kegiatan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Prov Kep Babel
3. Kegiatan pendataan Nomor Pokok Perpustakaan Sekolah di Prov. Kep. Babel
4. Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah
5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Perpustakaan
6. Kegiatan Lomba Pustakawan Terbaik Tingkat Provinsi
7. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Pustakawan
8. Kegiatan Seminar Kepustakawanan
9. Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi dan Uji Kompetensi Pustakawan/Pengelola Perpustakaan
10. Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Sekolah
11. Kegiatan Pendataan Nomor Pokok Perpustakaan di Prov Kep Babel
12. Kegiatan Penyusunan Profil Perpustakaan se-Prov Kep Bangka Belitung
13. Kegiatan Akreditasi Perpustakaan
14. Kegiatan penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan

IV. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

1. Kegiatan Pembinaan kearsipan di pemerintah prov. Kep. Bangka Belitung
2. Kegiatan Pembinaan, pendampingan dan lomba kearsipan di OPD Pemerintah Prov Kep Bangka Belitung
3. Kegiatan Arsip Masuk Desa
4. Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Kearsipan
5. Kegiatan Lomba kearsipan di provinsi kepulauan bangka belitung
6. Kegiatan Pembinaan kearsipan SMA/SMK dan SLB, Ormas, Perusahaan, BUMD dan PARPOL Prov Kep Bangka Belitung
7. Kegiatan Revisi Peraturan daerah tentang Kearsipan
8. Kegiatan Pengawasan kearsipan di pemerintah prov kep babel
9. Kegiatan Pengawasan kearsipan di Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung SMA/SMK dan SLB
10. Kegiatan Lomba arsiparis teladan Tingkat Prov Kep Bangka Belitung
11. Kegiatan Lomba pengelolaan Kearsipan desa/kel, OPD, LKD kab/kota
12. Kegiatan . Sosialisasi peraturan kearsipan
13. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Arsiparis